

# Akuntansi Anggaran Dalam Pengelolaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK): Studi Kasus Koperasi CooSAE

Alan Wahyu Hafiludin<sup>1\*</sup>, Masiyah Kholmi<sup>2</sup>, Ahmad Juanda<sup>3</sup>

<sup>1\*,2,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia.

Corresponding Email: [alanhepi@webmail.umm.ac.id](mailto:alanhepi@webmail.umm.ac.id)<sup>1\*</sup>

## Histori Artikel:

Dikirim 15 Juli 2025; Diterima dalam bentuk revisi 20 September 2025; Diterima 10 November 2025; Diterbitkan 1 Desember 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan Riset) – Lembaga KITA.

## Suggested citation:

Hafiludin, A. W., Kholmi, M., & Juanda, A. (2025). Akuntansi Anggaran Dalam Pengelolaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK): Studi Kasus Koperasi CooSAE. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(6), 5785-5794. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i6.5049>.

## Abstrak

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK) berperan sebagai peta keuangan yang mencerminkan prinsip partisipasi anggota, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan koperasi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan akuntansi anggaran dalam penyusunan RAPBK pada Koperasi CooSAE, koperasi yang bergerak di bidang perdagangan hasil pertanian. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus digunakan dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, telaah dokumen RAPBK, dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi anggaran di Koperasi CooSAE masih bersifat parsial. Penyusunan anggaran menghadapi kendala seperti rendahnya literasi akuntansi pengurus dan keterbatasan sistem informasi akuntansi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM koperasi dan digitalisasi proses penganggaran untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi keuangan. Temuan ini berkontribusi pada penguatan prinsip Good Cooperative Governance dalam pengelolaan keuangan koperasi.

**Kata Kunci:** Akuntansi Anggaran; Koperasi; Akuntabilitas; Digitalisasi; Transparansi Keuangan; Good Cooperative Governance.

## Abstract

The Cooperative Revenue and Expenditure Budget Plan (RAPBK) serves as a financial roadmap that reflects the principles of member participation, accountability, and efficiency in cooperative management. This study aims to describe the implementation of budgetary accounting in the preparation of the RAPBK at Koperasi CooSAE, a cooperative engaged in the trade of agricultural products. A qualitative approach with a case study design was employed, with data collected through in-depth interviews, document analysis of the RAPBK, and direct observation of the budgeting process. The findings indicate that the application of budgetary accounting principles at Koperasi CooSAE remains partial. The budgeting process faces challenges such as limited accounting literacy among management and inadequate accounting information systems. This study recommends enhancing the capacity of cooperative human resources and digitalizing the budgeting process as strategic steps to strengthen financial accountability and transparency. These findings contribute to the reinforcement of Good Cooperative Governance principles in cooperative financial management.

**Keyword:** Budgetary Accounting; Cooperative; Accountability; Digitization; Financial Transparency; Good Cooperative Governance.

## 1. Pendahuluan

Koperasi sebagai badan usaha yang berlandaskan prinsip keanggotaan aktif memegang peran strategis dalam mendorong kesejahteraan dan inklusi ekonomi, khususnya di sektor pertanian (Anshari & Manjaleni, 2024; Trisniarti *et al.*, 2022). Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola koperasi yang transparan dan akuntabel adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK). Dokumen ini memuat kebijakan keuangan tahunan koperasi, termasuk proyeksi pendapatan, rencana belanja operasional dan investasi, serta distribusi Sisa Hasil Usaha (SHU), dan menjadi dasar pertanggungjawaban pengurus kepada anggota (John Fery Sonoto, 2019; Siregar, 2020). Dalam praktiknya, fenomena yang umum terjadi di berbagai koperasi, khususnya koperasi sektor riil dan pertanian, menunjukkan bahwa penerapan akuntansi anggaran masih bersifat parsial. Sebagian besar hanya menyusun RAPBK secara manual menggunakan spreadsheet sederhana, tanpa disertai analisis varians, sistem pengendalian anggaran, atau pelaporan periodik yang terstandar (Sari *et al.*, 2024; Setyowati & Purwanto, 2013). Bahkan, sebagian pengurus masih menganggap RAPBK sebagai formalitas tahunan untuk memenuhi syarat rapat anggota, bukan sebagai alat manajemen dan pengendalian kinerja keuangan. Hal ini diperparah oleh rendahnya literasi akuntansi, lemahnya dukungan sistem informasi akuntansi (SIA), serta minimnya pelatihan teknis pengelolaan anggaran berbasis prinsip akuntansi. Kondisi ini berimplikasi pada munculnya ketidaksesuaian realisasi dengan anggaran, lemahnya efisiensi penggunaan dana, dan rendahnya akuntabilitas kepada anggota koperasi. Koperasi CooSAE, sebagai koperasi multi-pihak yang mengelola rantai pasok hortikultura dari petani ke pasar grosir di Kalimantan Timur, memiliki omzet tahunan yang signifikan dan struktur keanggotaan yang heterogen. Meskipun secara kelembagaan CooSAE telah mengalami pertumbuhan pesat, praktik penyusunan RAPBK masih mengandalkan format sederhana, belum terintegrasi dengan sistem akuntansi digital, dan minim evaluasi terhadap realisasi anggaran. Fenomena ini menunjukkan adanya gap antara kompleksitas kegiatan usaha dan kapasitas manajerial pengurus dalam pengelolaan anggaran koperasi, yang dapat menghambat efektivitas kontrol internal serta daya saing koperasi di era modernisasi. Sejumlah studi (Anshari & Manjaleni, 2024), menegaskan bahwa transformasi digital melalui penerapan sistem informasi akuntansi koperasi berbasis software, serta penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis, menjadi strategi krusial untuk meningkatkan efektivitas perencanaan dan pengendalian keuangan koperasi. Sejalan dengan itu, Kementerian Koperasi dan UKM RI melalui Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2015 mendorong penyusunan RAPBK yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, sebagai bagian dari implementasi Tata Kelola Koperasi yang Baik (Good Cooperative Governance/GCG) (Permenkop UKM, 2015).

Penelitian ini berangkat dari sejumlah pertanyaan utama yang ingin dijawab. Pertama, bagaimana penerapan prinsip-prinsip akuntansi anggaran seperti periodisasi, relevansi, fleksibilitas, dan partisipasi dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK) di Koperasi CooSAE. Kedua, apa saja kendala teknis maupun non-teknis yang dihadapi oleh pengurus dalam proses penganggaran. Ketiga, bagaimana peran sistem informasi akuntansi serta tingkat literasi keuangan pengurus dalam mendukung proses pengendalian anggaran. Terakhir, strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penyusunan dan implementasi RAPBK, khususnya melalui pelatihan serta digitalisasi sistem keuangan koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif implementasi prinsip-prinsip akuntansi anggaran dalam penyusunan RAPBK di Koperasi CooSAE. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala, baik teknis maupun non-teknis, yang mempengaruhi kualitas penganggaran koperasi. Penulis juga akan menganalisis peran sistem informasi akuntansi dan tingkat literasi keuangan pengurus dalam mendukung proses budgeting, serta merumuskan strategi yang dapat digunakan untuk memperkuat pengelolaan RAPBK melalui digitalisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang berguna bagi pengurus koperasi dalam meningkatkan kualitas penganggaran melalui pendekatan yang lebih sistematis, transparan, dan akuntabel. Bagi pemangku kepentingan seperti Dinas Koperasi dan lembaga pendamping, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menyusun program peningkatan kapasitas,

## RESEARCH ARTICLE

pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan koperasi, serta dalam merancang intervensi digitalisasi sistem keuangan koperasi yang berbasis komunitas dan partisipatif.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Akuntansi Anggaran

Menurut Garrison *et al.* (2011), akuntansi anggaran merupakan bagian integral dari sistem manajemen keuangan yang mencakup penyusunan rencana keuangan (anggaran), pengendalian terhadap realisasi, serta pelaporan dan analisis selisih (*variance analysis*) antara rencana dan pencapaian aktual. Fungsi akuntansi anggaran tidak hanya sebagai alat pencatatan, melainkan sebagai mekanisme proaktif dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Melalui proses budgeting, manajemen dapat menetapkan target operasional dan keuangan secara sistematis, sedangkan analisis varian berfungsi mengidentifikasi deviasi yang memerlukan tindakan korektif. Penerapan akuntansi anggaran berperan penting dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, memperkuat akuntabilitas terhadap anggota, dan mendukung transparansi pengelolaan keuangan. Hal ini ditegaskan oleh Rutto (2017) menemukan bahwa pengendalian anggaran terhadap aspek SDM dan arus kas secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja finansial koperasi simpan pinjam di Nairobi. Studi serupa di Ghana oleh Suleman & Gujral (2024) menunjukkan bahwa aktivitas budgeting seperti perencanaan, implementasi, dan evaluasi, memiliki kontribusi positif terhadap kinerja keuangan *credit unions* berbasis komunitas, yang mencerminkan pentingnya akuntansi anggaran dalam praktik koperasi internasional. Dengan demikian, akuntansi anggaran memiliki peran esensial sebagai alat pengendalian dan perencanaan keuangan koperasi di berbagai konteks geografi.

### 2.2 RAPBK Koperasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Permenkop UKM, 2015), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK) merupakan dokumen wajib yang harus disusun oleh pengurus koperasi sebagai bagian dari tanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan usaha koperasi. Dalam praktiknya, RAPBK berfungsi sebagai alat perencanaan dan kontrol, membantu pengurus mengantisipasi defisit atau potensi surplus serta menilai efisiensi penggunaan anggaran melalui instrumen seperti monitoring realisasi dan analisis varians budget terhadap aktual (Wahyudin, 2024). Implementasi RAPBK yang efektif juga memerlukan kapasitas teknis pengurus serta sistem pengendalian internal fungsi yang diperkuat melalui pelatihan RAPBK dan pendekatan "actual to budget" di kalangan koperasi simpan pinjam dan konsumen di Jawa Barat (Sugiyanto, 2025). Studi internasional pada SACCO di Nairobi bahkan menunjukkan bahwa kontrol anggaran yang baik berdampak positif pada kinerja keuangan organisasi secara signifikan, khususnya dalam pengelolaan kas dan sumber daya manusia (RUTTO, 2017). Dalam hal ini, RAPBK tidak hanya berperan sebagai dokumen administratif semata, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam tata kelola keuangan koperasi yang efisien dan adaptif terhadap dinamika usaha. Penyusunan RAPBK yang berbasis data, terukur, dan partisipatif juga mencerminkan komitmen koperasi terhadap nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi ekonomi yang menjadi dasar keberlangsungan koperasi jangka panjang. Maka dari itu, keberadaan RAPBK yang kuat tidak hanya memberikan arah keuangan, tetapi juga memperkuat daya saing koperasi dalam ekosistem ekonomi modern yang semakin kompleks.

### 2.3 Koperasi CooSAE

Koperasi CooSAE merupakan koperasi multi pihak yang memiliki struktur keanggotaan heterogen, terdiri dari tiga kelompok utama, yaitu petani produsen sebagai pemasok hasil pertanian, tenaga pengelola sebagai pelaksana operasional harian, serta investor anggota yang berkontribusi dalam bentuk modal usaha. Struktur keanggotaan yang inklusif ini mencerminkan prinsip demokrasi ekonomi, di mana setiap pihak memiliki peran dan kontribusi yang saling melengkapi dalam rantai nilai koperasi (ICA, 2021).

## RESEARCH ARTICLE

Dalam praktiknya, Koperasi CooSAE memfokuskan diri pada kegiatan agribisnis pascapanen yang meliputi pengumpulan hasil panen dari petani anggota, proses grading atau penyortiran berdasarkan kualitas, pengemasan sesuai standar pasar, serta pendistribusian ke berbagai saluran penjualan, terutama pasar grosir di wilayah Kalimantan Timur. Pendekatan ini bertujuan menciptakan nilai tambah pada produk pertanian dan menjamin kepastian pasar bagi petani. Konsep serupa diterapkan dalam berbagai koperasi agribisnis di Indonesia, di mana penguatan rantai pasok pascapanen terbukti meningkatkan pendapatan petani dan daya tawar kelembagaan koperasi (Pratiwi *et al.*, 2021). Model usaha ini menggambarkan bahwa koperasi bukan semata entitas simpan pinjam, melainkan juga unit bisnis kolektif yang berperan penting dalam memperkuat rantai pasok pertanian lokal, meningkatkan kesejahteraan anggota, serta memperluas akses pasar secara berkelanjutan.

## 2.4 Good Cooperative Governance dan Peran Akuntabilitas

Penerapan prinsip Good Cooperative Governance (GCG) dalam koperasi meliputi lima pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan, yang secara kolektif memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas kelembagaan dan kinerja keuangan koperasi. GCG bukan hanya kerangka normatif, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menjawab tantangan tata kelola modern, khususnya di tengah upaya digitalisasi dan tuntutan peningkatan daya saing koperasi sektor riil. Kajian empiris oleh Budiyah dan Suyono (2020) yang menganalisis sejumlah koperasi di Banyumas menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu variabel GCG yang memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja koperasi secara menyeluruh, baik dalam aspek manajerial maupun finansial. Akuntabilitas memungkinkan koperasi untuk mempertanggungjawabkan kebijakan, pengeluaran, dan hasil kinerja kepada anggota secara terbuka, sehingga membangun kepercayaan dan memperkuat partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan. Hal ini senada dengan temuan Handayani dan Darmawan (2024) pada koperasi simpan pinjam di Jembrana, yang menyatakan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan serta memperkuat mekanisme pertanggungjawaban kepada anggota, meskipun aspek transparansi dalam studi tersebut justru menunjukkan pengaruh negatif mengindikasikan perlunya strategi komunikasi dan literasi keuangan yang lebih adaptif. Oleh karena itu, akuntabilitas dalam konteks GCG tidak hanya menjadi ukuran kepatuhan administratif, tetapi juga pondasi moral dan operasional yang menjamin bahwa seluruh tahapan dalam penyusunan hingga realisasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK) dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan anggota.

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menggali secara mendalam proses penerapan akuntansi anggaran dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK) pada Koperasi CooSAE (Fatmawati & Aliyah, 2023). Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial dan proses-proses kompleks yang terjadi dalam konteks organisasi koperasi secara holistik. Lokasi penelitian berada di Koperasi CooSAE yang beroperasi di Kota Batu, Jawa Timur, sebuah wilayah dengan pertumbuhan koperasi yang cukup aktif dan beragam unit usaha yang mendukung kegiatan ekonomi anggota. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dirinci sebagai berikut:

- 1) Wawancara Mendalam

Informan kunci dalam penelitian ini meliputi Ketua Pengurus, Manajer Operasional, Bendahara, dan Kepala Unit Usaha, yang masing-masing memiliki peran strategis dalam proses penyusunan dan pengendalian anggaran koperasi.

- 2) Telaah Dokumen

Dokumen yang ditelaah dalam penelitian ini meliputi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK) tahun 2023 dan 2024 sebagai acuan utama dalam perencanaan keuangan

RESEARCH ARTICLE

koperasi. Selain itu, peneliti juga mengkaji laporan realisasi anggaran bulanan untuk menilai kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan anggaran. Notulen rapat anggota turut dianalisis guna memahami dinamika diskusi, keputusan-keputusan yang diambil, serta keterlibatan anggota dalam proses penyusunan dan evaluasi anggaran. Ketiga jenis dokumen ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik akuntansi anggaran di lingkungan koperasi.

3) Observasi

Observasi dilakukan secara langsung terhadap proses diskusi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK), untuk memahami bagaimana pengurus dan pihak terkait berperan dalam merumuskan rencana keuangan tahunan koperasi. Selain itu, peneliti juga memantau kegiatan monitoring realisasi anggaran secara triwulanan, guna memperoleh gambaran nyata mengenai implementasi anggaran dan mekanisme evaluasi yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan koperasi secara berkala.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dengan proses reduksi data untuk menyaring informasi penting dan relevan dari hasil wawancara, dokumen, serta observasi. Selanjutnya, data yang telah direduksi dikategorikan ke dalam tema-tema utama guna memudahkan pengorganisasian informasi berdasarkan fokus penelitian. Setelah itu, dilakukan penyusunan narasi deskriptif untuk menggambarkan secara rinci fenomena yang ditemukan di lapangan. Untuk memperkuat validitas temuan, dilakukan triangulasi data dengan cara membandingkan informasi dari berbagai sumber, yaitu hasil wawancara, dokumen, dan observasi. Keabsahan data juga dijamin melalui dua pendekatan utama. Pertama, triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber yang memiliki peran berbeda dalam struktur koperasi. Kedua, dilakukan member check, yaitu mengonfirmasi kembali hasil temuan dan interpretasi kepada pihak pengurus koperasi guna memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kenyataan dan tidak mengalami penyimpangan dari makna aslinya.

**4. Hasil dan Pembahasan**

**4.1 Hasil**

Proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK) di Koperasi CooSAE dimulai dengan evaluasi terhadap realisasi anggaran tahun berjalan, yang biasanya dilakukan pada bulan Oktober. Draft RAPBK disusun oleh Bendahara bersama Manajer Operasional, mencakup proyeksi pendapatan dari penjualan produk utama seperti sayuran dan buah-buahan, pendapatan dari jasa pengemasan, belanja operasional yang meliputi biaya transportasi, tenaga kerja, dan pengemasan, serta penyisihan untuk Sisa Hasil Usaha (SHU). Berdasarkan hasil observasi, RAPBK CooSAE telah mencakup klasifikasi pos pendapatan dan belanja sesuai standar akuntansi koperasi. Proses diskusi dalam rapat anggota berjalan cukup partisipatif, meskipun sebagian anggota masih belum sepenuhnya memahami detail akuntansi anggaran. Dalam implementasinya, CooSAE menggunakan format spreadsheet RAPBK yang dilengkapi dengan pencatatan realisasi bulanan. Sistem ini belum sepenuhnya berbasis perangkat lunak akuntansi koperasi. Format yang digunakan mencakup informasi penting seperti pos anggaran, anggaran tahunan, realisasi semesteran, dan selisih antara anggaran dan realisasi. Data anggaran tahunan dan realisasi semester pertama tahun 2024 di Koperasi CooSAE ditampilkan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Data RAPBK dan Realisasi Semester I Tahun 2024 di Koperasi CooSAE

No	Pos Anggaran	Anggaran Tahunan (2024)	Realisasi Semester I (2024)	Selisih
1	Penjualan Produk Utama	180.000.000	92.000.000	88.000.000
2	Pendapatan Jasa Pengemasan	20.000.000	9.500.000	10.500.000

RESEARCH ARTICLE

3	Biaya Transportasi	25.000.000	12.000.000	13.000.000
4	Biaya Pengemasan	18.000.000	9.000.000	9.000.000
5	Tenaga Kerja Harian	36.000.000	17.500.000	18.500.000
6	Penyisihan SHU	30.000.000	15.000.000	15.000.000
	Total	309.000.000	155.000.000	154.000.000

Dari temuan di lapangan, pengurus mampu mencatat dan menyusun laporan realisasi dengan baik, namun belum dilakukan analisis selisih secara mendalam. Selain itu, RAPBK belum terintegrasi dengan laporan arus kas proyeksi, yang seharusnya dapat memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai kondisi keuangan koperasi. Beberapa kendala dalam implementasi RAPBK di CoosAE antara lain adalah keterbatasan literasi akuntansi di kalangan pengurus dan anggota, sehingga pemahaman mengenai fungsi anggaran sebagai alat pengendalian keuangan masih minim. Selain itu, sistem informasi yang digunakan masih bersifat manual dan bergantung pada spreadsheet, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dan risiko kesalahan input data. Variabilitas pendapatan akibat fluktuasi harga komoditas juga menjadi tantangan tersendiri dalam membuat proyeksi pendapatan secara akurat. Meskipun demikian, pengurus dan anggota koperasi merasakan sejumlah manfaat dari adanya penyusunan dan implementasi RAPBK. Dokumen anggaran ini meningkatkan keterbukaan informasi keuangan kepada anggota, menjadi dasar pertimbangan dalam pembagian SHU, serta membantu pengambilan keputusan strategis, terutama yang berkaitan dengan pembiayaan modal kerja. Namun, keterbatasan literasi akuntansi di kalangan pengurus dan anggota berdampak signifikan terhadap efektivitas pengendalian keuangan koperasi. Minimnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip akuntansi anggaran menyebabkan proses evaluasi anggaran cenderung bersifat administratif, bukan analitis. Misalnya, meskipun selisih antara anggaran dan realisasi telah dicatat, tidak terdapat upaya sistematis untuk menelusuri penyebab deviasi tersebut atau menyusun langkah korektif secara tepat waktu. Hal ini mengurangi fungsi anggaran sebagai alat kontrol keuangan yang efektif. Selain itu, penggunaan sistem manual berbasis spreadsheet tanpa dukungan perangkat lunak akuntansi menambah kerentanan terhadap kesalahan input data, inkonsistensi format pelaporan, serta keterbatasan dalam menghasilkan laporan yang bersifat real-time. Akibatnya, proses pemantauan dan penyesuaian anggaran tidak dapat dilakukan secara dinamis, yang berpotensi menghambat respons cepat terhadap perubahan kondisi usaha, terutama pada sektor pertanian yang sangat dipengaruhi oleh musim dan fluktuasi harga pasar. Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas pengendalian keuangan, diperlukan intervensi strategis seperti pelatihan literasi akuntansi bagi pengurus dan anggota, serta adopsi sistem informasi akuntansi yang lebih terstruktur dan terotomatisasi.

**4.2 Pembahasan**

Proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK) di Koperasi CoosAE menunjukkan adanya pola perencanaan yang relatif sistematis. Proses ini diawali dengan tahapan evaluasi terhadap realisasi anggaran tahun sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi kebutuhan operasional dan pembiayaan program kerja mendatang. Pendekatan ini konsisten dengan model perencanaan partisipatif sebagaimana dikemukakan dalam literatur akuntansi koperasi, di mana pelibatan anggota koperasi menjadi salah satu prinsip utama dalam menentukan arah dan prioritas anggaran. Rapat anggota tahunan (RAT) yang diselenggarakan secara demokratis memperlihatkan bahwa koperasi berusaha menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam setiap pengambilan keputusan. Namun demikian, pada praktiknya, sebagian anggota masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep teknis terkait akuntansi anggaran, seperti pengklasifikasian akun, pengukuran biaya, hingga estimasi pendapatan jangka pendek dan panjang. Kendala pemahaman tersebut menggarisbawahi pentingnya peningkatan literasi keuangan dalam lingkungan koperasi, baik bagi pengurus maupun anggota secara umum. Penelitian oleh Lestari *et al.* (2022) menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap kapasitas pengelolaan keuangan koperasi, termasuk dalam hal perencanaan, pencatatan, dan pelaporan anggaran. Kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar akuntansi menyebabkan keterbatasan dalam menyusun RAPBK yang realistis dan terukur,

## RESEARCH ARTICLE

sehingga berpotensi menimbulkan deviasi anggaran atau inefisiensi pada pelaksanaannya. Dari sisi teknis, penyusunan RAPBK di CoosAE masih menggunakan perangkat spreadsheet secara manual, baik dalam menyusun rencana maupun mencatat realisasi bulanan. Meskipun tools ini dianggap praktis dan familiar oleh sebagian besar pengurus, penggunaan spreadsheet tidak terintegrasi secara otomatis dengan sistem proyeksi arus kas, yang seharusnya menjadi salah satu elemen penting dalam pelaporan keuangan koperasi sebagaimana diatur dalam PSAK No. 2 (Laporan Arus Kas). Menurut Manik *et al.* (2023), penyusunan laporan keuangan yang tidak mencantumkan proyeksi dan realisasi arus kas dapat mengurangi keakuratan informasi keuangan dan menghambat pengambilan keputusan berbasis data. Ketergantungan pada alat manual seperti spreadsheet juga meningkatkan potensi kesalahan input, duplikasi data, serta keterlambatan dalam proses rekonsiliasi keuangan. Sejalan dengan itu, studi oleh Budiningrum & Subiyantoro (2023) dan Vidianto *et al.* (2024) menemukan bahwa penggunaan sistem informasi akuntansi digital yang terintegrasi mampu memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan koperasi. Sistem tersebut biasanya mencakup fitur manajemen kas, pelaporan inventaris, analisis pendapatan dan pengeluaran, serta modul perencanaan anggaran. Dengan sistem digital, koperasi dapat meningkatkan efisiensi administrasi, meminimalkan risiko kesalahan manusia, serta mempercepat penyampaian laporan kepada anggota. Hal ini tentu mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi pilar penting dalam tata kelola koperasi modern. Selain itu, hasil observasi menunjukkan bahwa belum diterapkannya analisis selisih anggaran (*variance analysis*) secara sistematis juga menjadi kelemahan dalam proses pengendalian internal. Tanpa adanya pemantauan terhadap selisih antara anggaran dan realisasi, manajemen sulit melakukan evaluasi kinerja secara kuantitatif dan proaktif. Temuan ini selaras dengan pendapat Mardiasmo (2018) yang menekankan pentingnya analisis varian sebagai bagian dari sistem pengendalian fiskal pada organisasi nirlaba dan sektor publik. Tanpa analisis yang memadai, koperasi berisiko mengalami pemborosan anggaran, kesalahan alokasi dana, dan lambat dalam merespons perubahan kondisi keuangan.

Kendala lain yang tidak dapat diabaikan adalah rendahnya literasi digital dan terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem informasi secara optimal. Penggunaan spreadsheet secara manual tidak hanya menyulitkan dalam menyusun laporan yang kompleks, tetapi juga menyulitkan dalam menyajikan data secara real-time atau dalam bentuk visualisasi yang mudah dipahami oleh anggota. Penelitian pengabdian masyarakat oleh Wahyuni & Titis (2020) mengungkapkan bahwa rendahnya literasi keuangan dan pencatatan manual di koperasi simpan pinjam menjadi hambatan signifikan dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat, tepat waktu, dan berguna dalam proses pengambilan keputusan manajerial. Sebagai perbandingan, studi kasus pada Koperasi Wahana Agung, yang bergerak di sektor pertanian di Jambi, menunjukkan penerapan sistem informasi berbasis web yang terintegrasi secara menyeluruh. Sistem ini tidak hanya mengelola laporan keuangan, tetapi juga mencatat produksi pertanian, pengelolaan aset, dan distribusi hasil panen. Implementasi teknologi informasi tersebut telah memberikan dampak positif berupa pengurangan kesalahan pencatatan, percepatan proses pelaporan secara real-time, dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan data operasional dan keuangan (Fransiskoa *et al.*, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa adopsi sistem digital dan peningkatan kapasitas SDM dalam bidang teknologi menjadi strategi yang relevan dan efektif, terutama bagi koperasi berbasis sektor pertanian yang memiliki anggota dengan latar belakang non-akuntansi. Secara fungsional, RAPBK CoosAE memang telah digunakan sebagai dasar perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) dan penyusunan alokasi pembiayaan modal kerja. Namun, penggunaan RAPBK masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai alat manajemen strategis yang mampu mendorong efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan koperasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, strategi yang direkomendasikan adalah meningkatkan kapasitas literasi keuangan dan digital para anggota serta pengurus, melalui pelatihan berkelanjutan, pendampingan teknis, dan pengembangan sistem informasi akuntansi berbasis digital yang terintegrasi. Langkah ini diyakini mampu memperkuat efektivitas proses budgeting, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan koperasi secara keseluruhan.

## 5. Kesimpulan

Penerapan akuntansi anggaran dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK) di Koperasi CooSAAE telah berjalan secara parsial dan menunjukkan dampak positif terhadap pengendalian keuangan serta peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi. Meskipun demikian, masih terdapat ruang perbaikan yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan literasi akuntansi di kalangan pengurus serta keterbatasan sistem informasi akuntansi yang digunakan. Berdasarkan temuan penelitian, disarankan beberapa langkah strategis guna memperkuat praktik akuntansi anggaran, antara lain penyelenggaraan pelatihan rutin mengenai akuntansi anggaran bagi pengurus dan anggota koperasi, pemanfaatan software akuntansi koperasi untuk mengintegrasikan proses budgeting dengan pelaporan keuangan, penyusunan proyeksi arus kas sebagai bagian dari RAPBK untuk menggambarkan kondisi likuiditas dan keberlanjutan operasional, serta implementasi analisis selisih anggaran secara berkala guna mengevaluasi kinerja realisasi anggaran dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi koperasi dengan menyoroti pentingnya integrasi prinsip-prinsip akuntansi anggaran dalam praktik pengelolaan keuangan koperasi yang berskala kecil hingga menengah. Temuan ini memperluas pemahaman mengenai bagaimana pendekatan penganggaran berbasis akuntabilitas dapat diterapkan secara praktis di lingkungan koperasi, yang selama ini belum banyak dijelaskan dalam literatur konvensional. Selain itu, penelitian ini menekankan peran literasi akuntansi dan sistem informasi akuntansi sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi akuntansi anggaran, sehingga dapat menjadi landasan teoritis untuk studi-studi lanjutan mengenai tata kelola koperasi berbasis transparansi dan partisipasi anggota.

## 6. Referensi

- Anshari, M. I., & Manjaleni, R. (2024). Pengaruh Digitalisasi Terhadap Efisiensi dan Efektivitas Proses Akuntansi Pada Koperasi Pesantren. *Journal of Economics and Accounting*, 5(1), 51–58. <https://doi.org/10.47065/arbitrase.v5i1.2036>.
- Budiningrum, E. W., & Subiyantoro, A. (2023). SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KOPERASI UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING PENGELOLAAN KOPERASI. *JURNAL ECONOMINA*, 2(3 SE-Articles), 738–752. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i3.389>.
- Budiyah, F., & Suyono, E. (2020). Good Cooperatives' Governance and Performance in Banyumas Region. *Kompartemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 18(2 SE-Artikel). <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v18i2.7469>.
- Fatmawati, D., & Aliyah, S. (2023). Analisis Pengendalian Biaya Tenaga Kerja Dengan Menggunakan Anggaran (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara). *EKOBIS SYARIAH*, 6(02), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/ekobis.v6i2.16277>.
- Fransiskoa, F., Meilanoa, R., & Triana, H. (2025). IMPLEMENTASISISTEM INFORMASI MONITORING PELAPORAN PRODUKSI SAWIT PADA KOPERASIAHANAAGUNG. *Jurnal Elektronika, Listrik Dan Teknologi Informasi Terapan*, 7(1), 32–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.37338/elti.v7i1.450>.
- Garrison, Ray H.; Noreen, Eric W.; Brewer, P. C. (2011). *Managerial Accounting* (14th ed.). McGraw Hill.

## RESEARCH ARTICLE

- Handayani, P. A., & Darmawan, N. A. S. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Jembrana. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 15(02 SE-Articles), 448–463. <https://doi.org/10.23887/jap.v15i02.78367>.
- ICA. (2021). *Cooperative identity, values & principles*. International Cooperative Alliance. <https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity>
- John Fery Sonoto. (2019). Studi Pustaka Proses Bisnis Koperasi: Teori Adaptif Structurasi. *Aktual : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 47–56.
- Lestari, D., Nas, S., & Riadi, R. M. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kemampuan Pengelolaan Keuangan Pengurus Koperasi Unit Desa Gunung Sari Kabupaten Kampar. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(5 SE-Articles), 6445–6453. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.7728>.
- Manik, I. A. P. I., Iskandar, E., & Anan, M. (2023). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) No.2 Tentang Laporan Arus Kas Pada Cv. Mandiri Pratama Sejahtera. *Worksheet : Jurnal Akuntansi*, 2(2), 86–92. <https://doi.org/10.46576/wjs.v2i2.3465>.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik: Edisi terbaru (Edisi I)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Permenkop UKM. (2015). Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi. *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 65(879)*, 2004–2006.
- Pratiwi, L. P. K., Jaya, I. K. P. K., & Maharani, M. K. (2021). The Effectiveness of Integrated Agribusiness Cooperatives on The Income of Local Farmers. *Journal of Sustainable Development Science*, 3(2 SE-Articles). <https://doi.org/10.46650/jsds.3.2.1160.56-63>.
- RUTTO, K. J. (2017). Effect of Budgetary Control on Financial Performance of Savings and Credit Cooperative Organizations in Nairobi County. *Strategic Journal of Business & Change Management*, 4(2). <https://doi.org/10.61426/sjbcm.v4i2.467>.
- Sari, Y. P., Amin, M., & Afifudin. (2024). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Koperasi Daerah (Studi Kasus Koperasi Unit Daerah Karang Ploso Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(02), 65–71.
- Setyowati, L., & Purwantoro. (2013). Analisis pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial dengan kepuasan kerja, job relevant information dan kepuasan kerja .... *Media Ekonomi & Teknologi Informasi*, 21(2), 66–79.
- Siregar, A. P. (2020). Kinerja Koperasi Di Indonesia. *Vigor: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika Dan Subtropika*, 5(1), 31–38. <https://doi.org/10.31002/vigor.v5i1.2416>.
- Sugiyanto, S. (2025). Pelatihan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi dengan Metode Actual To Budget+. *E-Coops-Day*, 6(1 SE-Articles), 97–108. <https://doi.org/10.32670/ecoopsday.v6i1.5177>.

## RESEARCH ARTICLE

- Trisniarti, N., Sofyana, N. N., & Azhari, A. (2022). The Contribution of Cooperatives to the Indonesian Economy. *Almana: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 6(3), 452–459. <https://doi.org/10.36555/almana.v6i3.1927>.
- Vidianto, A., Hendrawan, N. D., & Kunci, K. (2024). *Pengembangan Aplikasi Koperasi Terintegrasi dengan Sistem Akuntansi Berbasis Web*. 4910–4918.
- Wahyudin, W. (2024). Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK): Pelatihan Perkoperasian bagi Pengelola Koperasi se Jawa Barat. *E-Coops-Day*, 5(1 SE-Articles), 75–82. <https://doi.org/10.32670/ecoopsday.v5i1.4198>.
- Wahyuni, & Titis. (2020). Literasi Akuntansi Dan Keuangan Untuk Meningkatkan Kapasitas Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Pada Koperasi Simpan Pinjam. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 3(1).
- Yussif Suleman (CA), & Dr. Tripti Gujral. (2024). Budgeting And Budgetary Control Predictors of Financial Performance in Ghana: An Analytical Review Of Community-Based Credit Unions (CCUs). *Educational Administration: Theory and Practice*, 30(4 SE-Articles), 2540–2549. <https://doi.org/10.53555/kuey.v30i4.1892>.